

**IMPLEMENTASI *SMART GOVERNANCE* DALAM
MEWUJUDKAN *SMART CITY* DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MAULIDA IKHWANI

NIM. 170802022

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maulida Ikhwani
NIM : 170802022
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 13 Juli 1999
Alamat : Jl. T Syarief Thayeb, No. 31, Lambhuk,
Ulee Kareng, Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 17 Mei 2024



MAULIDA IKHWANI
NIM. 170802022

**IMPLEMENTASI *SMART GOVERNANCE* DALAM
MEWUJUDKAN *SMART CITY* DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

MAULIDA IKHWANI

NIM. 170802022

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002

Pembimbing II



Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032003

**IMPLEMENTASI *SMART GOVERNANCE* DALAM
MEWUJUDKAN *SMART CITY* DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI
MAULIDA IKHWANI
NIM. 170802022

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 11 Juli 2024M
05 Muharram 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002

Sekretaris,

Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032003

Penguji I

Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Penguji II,

Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP. 198905182023211032

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Indonesia yang menerapkan *smart city*. *Smart City* merupakan konsep kota cerdas dimana tata kelola pemerintahannya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi secara ekstensif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pelaksanaan *Smart City* di Banda Aceh diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Implementasi *Smart City* dan Peta Jalan Implementasinya. Peta jalan atau *roadmap* pelaksanaannya menekankan pada 6 (enam) pilar pelaksanaan, salah satunya adalah *smart governance*. *Smart governance* merupakan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pelaksanaan pelayanan publik yang terintegrasi, manajemen birokrasi yang efektif, dan efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi *smart governance* di Kota Banda Aceh melalui metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh berhasil menjadi *smart city* dengan implementasi *smart governance* yang baik karena terdapat pelayanan publik yang terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik, manajemen birokrasi yang efektif melalui sistem e-Kinerja, dan adanya efisiensi kebijakan publik melalui SIPD dan e-Musrenbang. Hasil penelitian juga menunjukkan masih adanya kendala dalam upaya manajemen birokrasi yang efisien yaitu sulitnya akses aplikasi e-Kinerja bagi ASN tua yang belum melek teknologi hingga kendala jaringan dan server.

Kata kunci: *Smart City, Smart Governance, Kota Banda Aceh*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Inayah, Taufik, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi *Smart Governance* dalam Mewujudkan *Smart City* di Kota Banda Aceh”. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta Keluarga dan para Sahabat beliau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini mengalami banyak kendala, namun berkat pertolongan Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan Rahmat, Inayah, Taufik, dan Hidayah-Nya, disertai bimbingan dari berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat dihadapi.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada kedua orang tua, pimpinan UIN Ar-Raniry dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, pimpinan Prodi Ilmu Administrasi Negara, dosen pembimbing, seluruh dosen dan pengajar di Prodi Ilmu Administrasi Negara, serta para informan yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.

Skripsi ini penulis akui yang masih banyak kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki masih sangat minim dan kurang. penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan masukan-masukan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini dan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, Mei 2024

Maulida Ikhwani

DAFTAR ISI

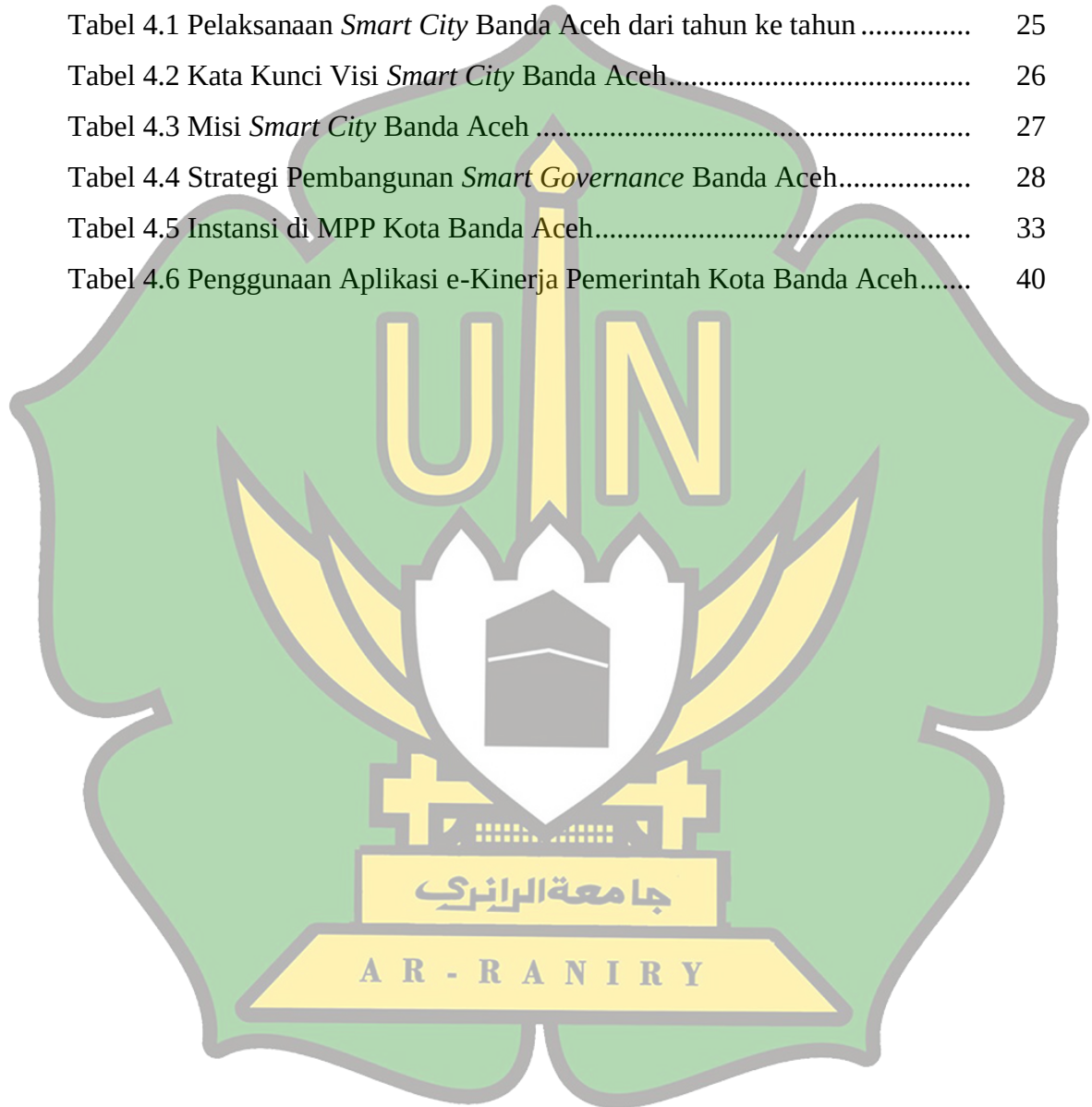
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Penjelasan Istilah.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Teori <i>Smart City</i>	10
2.3. Konsep <i>Smart Governance</i>	13
2.3.1 Aspek Pelaksanaan <i>Smart Governance</i>	14
2.4 Kerangka Pemikiran.....	15
 BAB III METODE PENELITIAN	 17
3.1. Pendekatan Penelitian	17
3.2. Fokus Penelitian.....	17
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	18
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	18

3.5. Informan Penelitian	19
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.7. Teknik Analisis Data.....	22
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Gambaran Umum Pelaksanaan <i>Smart City</i> Banda Aceh	24
4.2 Implementasi <i>Smart Governance</i> dalam Mewujudkan <i>Smart City</i> di Kota Banda Aceh.....	27
4.2.1 Peningkatan Pelayanan Publik (<i>Public Service</i>) di Kota Banda Aceh	28
4.2.2 Manajemen Birokrasi (<i>Bureaucracy</i>) di Kota Banda Aceh.....	33
4.2.3 Efisiensi Kebijakan Public (<i>Public Policy</i>) di Kota Banda Aceh	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
DAFTAR LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

A R - R A N I R Y

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	17
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Pelaksanaan <i>Smart City</i> Banda Aceh dari tahun ke tahun	25
Tabel 4.2 Kata Kunci Visi <i>Smart City</i> Banda Aceh.....	26
Tabel 4.3 Misi <i>Smart City</i> Banda Aceh	27
Tabel 4.4 Strategi Pembangunan <i>Smart Governance</i> Banda Aceh.....	28
Tabel 4.5 Instansi di MPP Kota Banda Aceh.....	33
Tabel 4.6 Penggunaan Aplikasi e-Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.....	40



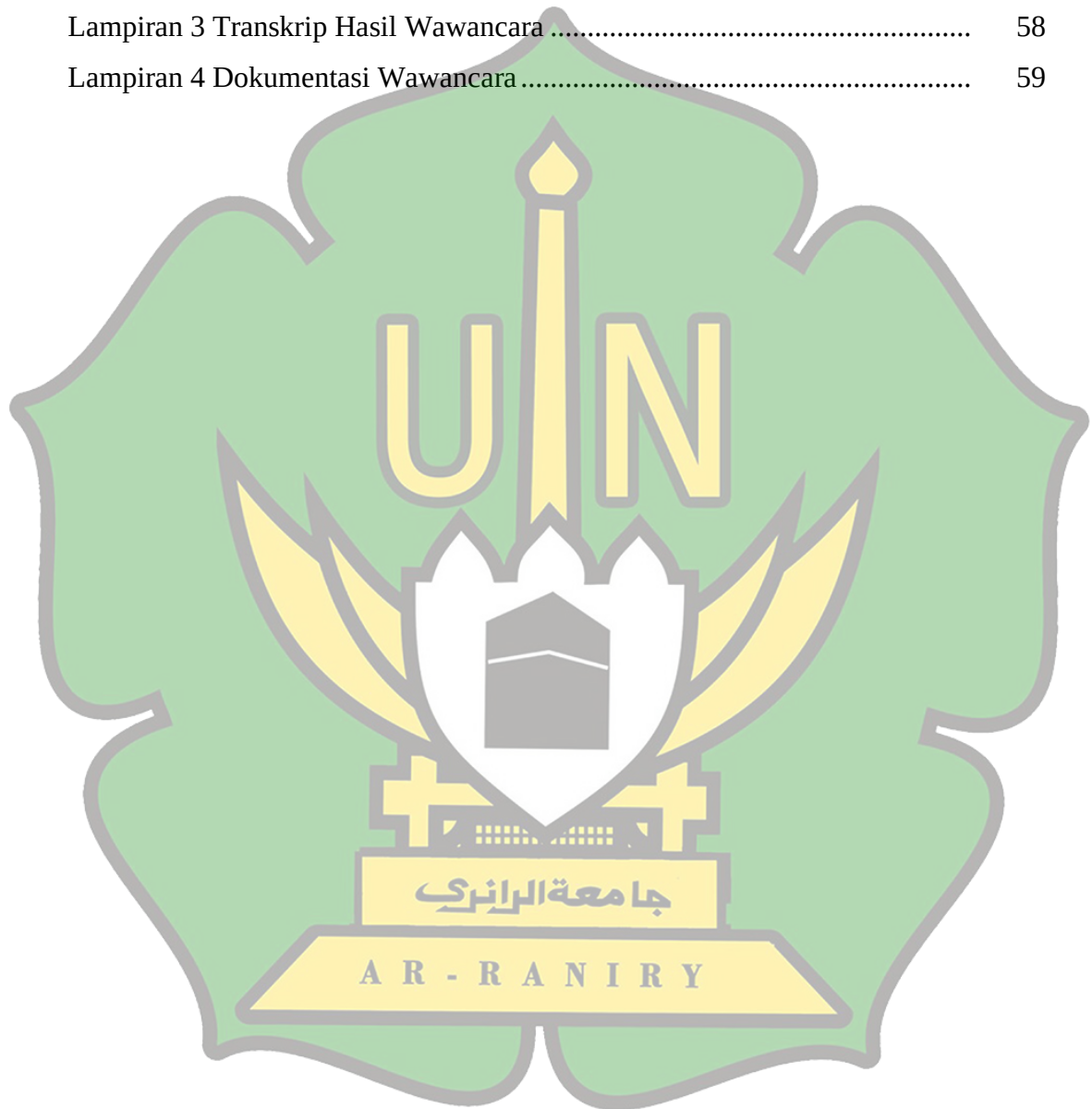
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 4.1 Penggunaan Aplikasi e-Kinerja.....	37
Gambar 4.2 Tampilan Aplikasi e-Kinerja BKN	39
Gambar 4.3 Tampilan Aplikasi e-Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry	56
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	57
Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara	58
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Smart City adalah kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, kualitas kehidupan masyarakat, dan manajemen data melalui pemerintahan yang berbasis partisipasi masyarakat.¹ *Smart City* merupakan impian kota-kota di negara demokrasi.² Dengan konsep ini, maka pengelolaan kota akan terintegrasi dan tertata dengan baik melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Konsep *Smart City* sudah banyak diterapkan di berbagai kota di dunia. Penerapannya pun biasanya bersifat parsial pada masalah-masalah prioritas. Sebagai contoh, Kota Amsterdam yang mendasarkan penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi polusi. Berbeda dengan Kota Tallim, ibukota Estonia, yang menerapkan *Smart City* dari segi pemerintahannya dengan sistem *E-Government* dan penggunaan kartu tanda penduduk digital bagi masyarakatnya. Sementara itu, Kota Songdo di Korea Selatan menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan Songdo sebagai pusat bisnis internasional.³ Artinya, *Smart City* dapat diterapkan di segala dimensi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di suatu kota.

¹ Han Schaffers, et.al. *Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation*. Future Internet Assembly. 2011.

² Abdurrozaq Hasibuan. *Smart City, Konsep Kota Cerdas sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota*. Buletin Utama Teknik, Vol. 14, No. 2, 127-135. 2019.

³ *Ibid*, Hlm 129

Penerapan *Smart City* di Indonesia sudah mulai diinisiasi sejak tahun 2003 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang mulai menerapkan *Smart City*. Pelaksanaan *Smart City* di Indonesia kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab 21 Undang-Undang ini, diatur secara khusus tentang inovasi daerah. Setiap daerah di Indonesia dapat berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian, pada tahun 2017, digagas Gerakan Menuju 100 *Smart City* untuk mendampingi 100 kota/kabupaten sebagai percontohan dalam menyusun rencana induk (master plan) *Smart City* dan menerapkannya pada masing-masing daerah. Adapun pilar atau cakupan pelaksanaan *Smart City* di Indonesia meliputi *smart governance*, *smart society*, *smart living*, *smart economy*, *smart environment*, dan *smart branding*.⁴ Keenam pilar ini sesuai dengan konsep Cohen (2014) yang diadopsi oleh pemerintah.⁵

Kota Banda Aceh merupakan salah satu diantara 100 kota di Indonesia yang dijadikan percontohan *Smart City* oleh pemerintah pusat.⁶ Pelaksanaan *Smart City* di Banda Aceh diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020. Peta jalan atau *roadmap* pelaksanaannya pun sudah dibuat dengan menekankan pada 6 (enam)

⁴ Cohen. 2014. *The Smartest Cities In The World 2015*. Di akses melalui <https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology>

⁵ Hasibuan. 2019. *Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara*. Buletin Utama Teknik Vol. 14, No. 2.

⁶ <https://bandaacehkota.go.id/berita/13989/banda-aceh-salah-satu-kota-percontohan-smart-city-di-indonesia.html> (diakses pada Rabu, 1 Mei 2024 pukul 15.47 WIB).

pilar pelaksanaan seperti yang disebutkan di atas.⁷ Dari enam pilar tersebut, yang paling bersinggungan dengan pelayanan publik adalah *Smart Governance*. *Smart Governance* diartikan sebagai tata kelola pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi secara ekstensif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.⁸

Smart governance diimplementasikan dalam tiga aspek atau sub-pilar, yaitu peningkatan pelayanan publik (*public service*) melalui integrasi, kecepatan, dan keterbukaan pelayanan (*government to citizen*), manajemen birokrasi yang efisien (*bureaucracy*) melalui pengawasan dan manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis elektronik, serta efisiensi kebijakan publik (*public policy*) melalui partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.⁹

Peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan integrasi pelayanan dilakukan melalui pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2019. Kehadiran MPP menjadi komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan layanan yang terintegrasi bagi masyarakat.¹⁰ MPP Banda Aceh bertempat di Gedung Pasar Atjeh Lantai 3 dan terdiri dari 29 instansi dengan 107 jenis pelayanan, baik itu pelayanan administrasi dan kemasyarakatan dari instansi vertikal Pemerintah Kota Banda Aceh maupun instansi lain seperti kepolisian, asuransi, dan lain sebagainya.¹¹

⁷ *Ibid.*

⁸ Cellary. 2013. *Smart Governance for Smart Industries*. In Proceedings of the 7th International Conference on theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV '13).

⁹ Cohen. 2014. *The Smartest Cities In The World 2015*. Di akses melalui <https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology>

¹⁰ <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pemerintah-apresiasi-komitmen-pemkot-banda-aceh-bangun-mpp> (diakses pada Kamis, 18 Juli 2024 pukul 14.30 WIB).

¹¹ <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/390431/mal-pelayanan-publik-banda-aceh-resmi-diluncurka?show=> (diakses pada Kamis, 18 Juli 2024 pukul 14.00 WIB).

Manajemen birokrasi yang efisien dilakukan melalui manajemen kinerja ASN berbasis elektronik dengan aplikasi e-Kinerja. Aplikasi e-Kinerja digagas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2023 melalui Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023. BKN mewajibkan seluruh pemerintah daerah menggunakan e-Kinerja dalam manajemen kepegawaian di daerahnya, termasuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan penggunaan e-Kinerja, manajemen birokrasi di Banda Aceh menjadi baik diantaranya dapat tercermin dari promosi dan mutasi berdasarkan *equal job for equal pay*, memudahkan pengawasan bagi pemerintah, dan adanya efektifitas serta efisiensi dari unit kerja.¹²

Sementara itu, efisiensi kebijakan publik dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Unsur masyarakat melalui aparatur Gampong di Kota Banda Aceh dilibatkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).¹³ Setiap Gampong dapat mengusulkan tiga program prioritas yang nantinya dapat diinput pada SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).¹⁴

Penelitian ini ingin menganalisis lebih mendalam bagaimana implementasi *Smart Governance* di Kota Banda Aceh berdasarkan praktiknya dalam peningkatan pelayanan publik, manajemen birokrasi yang efisien, dan efisiensi kebijakan publik dan apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasinya.

¹² Ikhwani Rahmatika Latif. *Analisis Implementasi e-Kinerja pada Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh*. International Journal of Government and Social Science, Vol. 7, No. 1.

¹³ <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2022/04/08/kecamatan-kuta-alam-gelar-musrenbang/> (diakses pada Kamis, 18 Juli 2024 pukul 16.00 WIB).

¹⁴ *Ibid.*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik dan memberikan perhatian pada bentuk implementasi *Smart Governance* dalam mewujudkan Banda Aceh *Smart City*. Melalui hasil observasi awal penulis, implementasi *Smart Governance* dilakukan melalui berbagai program pada tiga aspek, yaitu peningkatan pelayanan publik (*public service*) melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), manajemen birokrasi yang efisien (*bureaucracy*) melalui e-kinerja, dan efisiensi kebijakan publik (*public policy*) melalui E-Musrenbang atau SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Berdasarkan hasil observasi tersebut, penulis ingin menganalisis lebih dalam melalui penelitian ini terkait bentuk implementasi *Smart Governance* dalam mewujudkan Banda Aceh *Smart City* dan apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasinya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *Smart Governance* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasi *Smart Governance* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi *Smart Governance* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Banda Aceh.

2. Mengetahui apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasi *Smart Governance* dalam mewujudkan *Smart City* di Kota Banda Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial. Khususnya bagi kalangan akademisi Ilmu Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Sebagai saran dan masukan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan implementasi *Smart Governance* untuk mewujudkan Banda Aceh *Smart City*.

1.6 Penjelasan Istilah

1. *Smart Governance*

Tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pelaksanaan pelayanan publik yang terintegrasi, manajemen birokrasi yang efektif, dan adanya efisiensi dalam pelayanan.¹⁵

2. *Smart City*

Kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan

¹⁵ Edi Surya Negara. 2021. *Smart Government*. Palembang: PPP-UBD Press. Hlm 149.

ekonomi, kualitas kehidupan masyarakat, dan manajemen data melalui pemerintahan yang berbasis partisipasi masyarakat.¹⁶



¹⁶ Han Schaffers, et.al. *Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation*. Future Internet Assembly. 2011.